

Eksplorasi Kualitatif tentang Tindakan Antisipatif Pemerintah dalam Menghadapi Krisis Ekonomi: Kasus Kebijakan Moneter dan Fiskal

Dinda Fadila Asih

¹ Prodi Perbankan Syariah Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Nurhidayati Husna

² Prodi Perbankan Syariah Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Muhammad Fadhil Hamdani

³ Prodi Perbankan Syariah Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Mira Dipa

⁴ Prodi Perbankan Syariah Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Pani Akhiruddin Siregar

⁵ Prodi Perbankan Syariah Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Alamat : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Korespondensi penulis: dindafadila819@gmail.com

Abstract. *This study aims to explore the government's anticipatory actions in facing the economic crisis by using monetary and fiscal policies through literature review or library research methods. This approach allows researchers to explore various theories, views, and results of previous research that are relevant in understanding the government's anticipatory actions in dealing with economic crises using monetary and fiscal policies. This research uses the library research method. Based on the results and discussion, it can be concluded that monetary and fiscal policies are the main instruments used by the government to overcome and respond to the economic crisis. Monetary policy, run by the central bank, aims to influence monetary variables such as interest rates, money supply, and exchange rates, with the aim of achieving price stability, balanced economic growth, and financial system stability. Meanwhile, fiscal policy, which involves regulating government revenues and expenditures, aims to achieve high economic growth, create jobs, and maintain economic stability through tax, spending, and fiscal stimulus arrangements, and these two policies are interrelated and play an important role in maintaining national economic stability. Meanwhile, fiscal policy, which involves regulating government revenues and expenditures, aims to achieve high economic growth, create jobs, and maintain economic stability through tax, spending, and fiscal stimulus arrangements, and these two policies are interrelated and play an important role in maintaining national economic stability. Monetary and fiscal policies can be used together to respond to economic crises, such as recession or high*

inflation, by creating a more stable economic environment and providing long-term benefits to society as a whole.

Keywords: *Central banks, monetary policy, private investment, and qualitative impact.*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplor tindakan antisipatif pemerintah dalam menghadapi krisis ekonomi dengan menggunakan kebijakan moneter dan fiskal melalui kajian pustaka atau metode penelitian kepustakaan. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menggali berbagai teori, pandangan, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan dalam memahami tindakan antisipatif pemerintah dalam menghadapi krisis ekonomi dengan menggunakan kebijakan moneter dan fiskal melalui. Penelitian ini menggunakan metode kajian kepustakaan (*library research*). Berdasarkan hasil dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa kebijakan moneter dan fiskal merupakan instrumen utama yang digunakan pemerintah untuk mengatasi dan merespons krisis ekonomi. Kebijakan moneter, yang dijalankan oleh bank sentral, bertujuan untuk mempengaruhi variabel moneter seperti suku bunga, uang beredar, dan nilai tukar, dengan tujuan mencapai stabilitas harga, pertumbuhan ekonomi yang seimbang, dan stabilitas sistem keuangan. Sementara itu, kebijakan fiskal, yang melibatkan pengaturan pendapatan dan pengeluaran pemerintah, bertujuan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi, menciptakan lapangan kerja, dan menjaga stabilitas ekonomi melalui pengaturan pajak, pengeluaran, dan stimulus fiskal, dan kedua kebijakan ini saling terkait dan berperan penting dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional. Kebijakan moneter dan fiskal dapat digunakan bersama-sama untuk merespons krisis ekonomi, seperti resesi atau inflasi tinggi, dengan menciptakan lingkungan ekonomi yang lebih stabil dan memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat secara keseluruhan.

Kata Kunci: Kebijakan fiskal, kebijakan moneter, krisis ekonomi, pemerintah.

LATAR BELAKANG

Dalam dinamika ekonomi global yang terus berkembang, pemerintah seringkali dihadapkan pada tantangan menghadapi krisis ekonomi yang dapat mengganggu stabilitas dan pertumbuhan ekonomi sebuah negara. Krisis ekonomi bisa berasal dari berbagai sumber, termasuk perubahan kondisi pasar global, krisis keuangan, atau pun peristiwa alam yang tidak terduga. Dalam menghadapi krisis semacam ini, tindakan antisipatif yang diambil oleh pemerintah menjadi krusial untuk meminimalkan dampak negatifnya.

Menurut Khan (2011), kebijakan moneter berfungsi untuk mengatasi masalah yang timbul akibat ketidakstabilan ekonomi. Dalam pandangan ini, Khan menyatakan bahwa tujuan kebijakan moneter tidak hanya bertujuan untuk menyeimbangkan tingkat inflasi, tetapi juga berinteraksi secara dinamis dengan tujuan makroekonomi lain yang krusial, seperti pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, stabilitas harga, mitigasi fluktuasi dalam siklus ekonomi, pencegahan krisis keuangan, serta stabilisasi suku bunga jangka panjang dan nilai tukar riil.

Kebijakan fiskal, secara etimologis, berasal dari gabungan dua kata, yakni "kebijakan" dan "fiskal". Istilah "kebijakan" memiliki beragam makna. Menurut Abraham Kaplan, Harold D, dan Lawes, kebijakan merujuk pada program atau upaya yang ditujukan untuk mencapai tujuan, nilai-nilai, dan praktik yang terarah. Dalam konteks kebijakan fiskal, pengertian ini dapat diartikan sebagai runtutan langkah atau tindakan yang diambil oleh pemerintah dengan tujuan untuk mengubah sistem perpajakan atau pengeluaran, dengan harapan dapat memberikan solusi bagi masalah ekonomi yang sedang dihadapi (Sukirno, 2016).

Dalam konteks ini, kebijakan moneter dan fiskal menjadi instrumen utama yang digunakan oleh pemerintah untuk merespons krisis ekonomi. Kebijakan moneter melalui bank sentral biasanya mencakup pengaturan suku bunga, likuiditas pasar, dan intervensi mata uang, sementara kebijakan fiskal yang dilakukan oleh pemerintah meliputi pengeluaran publik, pajak, dan subsidi.

Eksplorasi kualitatif tentang tindakan antisipatif pemerintah dalam menghadapi krisis ekonomi menjadi penting untuk memahami bagaimana kebijakan moneter dan fiskal dirancang, diimplementasikan, dan dievaluasi dalam situasi yang mendesak. Melalui pendekatan kualitatif, kita dapat menelusuri aspek-aspek seperti pertimbangan politik, strategi komunikasi, serta respons masyarakat terhadap kebijakan tersebut.

Dalam konteks penelitian ini, metode library research atau kajian pustaka dapat memberikan landasan yang kokoh untuk mengidentifikasi dan menganalisis berbagai teori, konsep, dan temuan empiris terkait kebijakan moneter dan fiskal dalam menghadapi krisis ekonomi. Dengan menggunakan sumber-sumber yang tersedia, peneliti dapat menyusun pemahaman yang komprehensif tentang berbagai pendekatan dan praktik terbaik yang dapat diadopsi oleh pemerintah dalam situasi krisis ekonomi.

I. Manfaat Penelitian

Penelitian yang dilakukan ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak, antara lain:

1. Identifikasi strategi efektif dalam menghadapi krisis ekonomi.
2. Pengukuran responsivitas pemerintah terhadap krisis ekonomi.
3. Wawasan untuk perencanaan kebijakan ekonomi masa depan.
4. Informasi berharga bagi pembuat kebijakan, praktisi ekonomi, dan masyarakat umum.
5. Memperkaya literatur akademis dalam bidang kebijakan ekonomi.

KAJIAN TEORI

Kebijakan moneter memiliki peran sentral dalam mencapai target-target ekonomi makro suatu negara, seperti yang disebutkan oleh Abdianti dkk. (2023) dan Siregar (2021). Menurut Jhingan (2016), kebijakan moneter ialah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh otoritas moneter suatu negara untuk mengatasi berbagai masalah yang berkaitan dengan sektor moneter. Hal ini mencakup pengendalian lembaga keuangan serta aktivitas penjualan dan pembelian kertas berharga oleh otoritas moneter sebagai upaya sengaja untuk mengubah kondisi uang dalam perekonomian. Secara

esensial, kebijakan moneter bertujuan untuk memperbaiki keadaan ekonomi dengan mengatur jumlah uang yang beredar. Adapun jumlah uang yang beredar, dalam analisis ekonomi makro, memegang peran sentral dalam menentukan tingkat output ekonomi serta stabilitas harga-harga.

Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menciptakan undang-undang dan program yang bertujuan menjaga kesejahteraan ekonomi semua warganya. Kebijakan fiskal mencerminkan langkah-langkah yang diambil pemerintah untuk mengendalikan arah ekonomi dengan mengubah tingkat pengeluaran dan sistem perpajakan. Tujuan umum dari kebijakan ini adalah untuk mencapai indikator-indikator ekonomi yang positif, seperti pertumbuhan ekonomi yang stabil, tingkat pengangguran yang rendah, dan stabilitas harga (Cahya, 2019).

Kebijakan moneter dan fiskal memiliki peran yang vital dalam mencapai stabilitas dan pertumbuhan ekonomi yang diinginkan oleh suatu negara, namun melalui pendekatan yang berbeda. Kebijakan moneter, dengan fokus pada pengaturan jumlah uang yang beredar dan suku bunga, memberikan fleksibilitas bagi otoritas moneter untuk menanggapi perubahan kondisi ekonomi secara cepat dan tepat. Sementara itu, kebijakan fiskal, yang berkaitan dengan pengeluaran pemerintah dan sistem perpajakan, memiliki dampak yang lebih langsung terhadap aktivitas ekonomi, seperti pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik.

Meskipun berbeda dalam pendekatan dan instrumen yang digunakan, kebijakan moneter dan fiskal saling melengkapi satu sama lain. Kedua kebijakan tersebut bekerja bersama-sama untuk mencapai tujuan-tujuan ekonomi makro yang holistik. Misalnya, dalam situasi di mana kebijakan moneter tidak cukup efektif dalam merangsang pertumbuhan ekonomi, pemerintah dapat menggunakan kebijakan fiskal untuk memberikan stimulus tambahan melalui peningkatan pengeluaran publik atau pemotongan pajak.

Dengan demikian, kebijakan moneter dan fiskal sama-sama berperan dalam mencapai stabilitas dan pertumbuhan ekonomi yang diinginkan oleh suatu negara, namun melalui pendekatan yang berbeda. Keduanya saling melengkapi untuk mencapai tujuan-tujuan ekonomi makro yang diinginkan.

METODE PENELITIAN

Secara mendasar, metode penelitian adalah pendekatan ilmiah yang digunakan untuk memperoleh data dengan tujuan dan manfaat yang spesifik (Sangadji & Sopiah, 2013 dalam Siregar, dkk., 2022). Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan (*library research*) yang mengacu pada analisis teks atau wacana untuk menyelidiki suatu peristiwa atau tulisan tertentu. Sebagaimana dijelaskan oleh Hamzah (2020), metode ini bertujuan untuk menemukan fakta-fakta yang tepat, seperti asal-usul suatu peristiwa atau penyebab sebenarnya. Dalam konteks penelitian ini, pendekatan penelitian kepustakaan memberikan kesempatan bagi peneliti untuk mengeksplorasi dan mengidentifikasi berbagai sudut pandang serta argumen yang relevan dari literatur yang ada.

Selain itu, pendekatan penelitian kepustakaan, sebagaimana yang diuraikan oleh Mardalis dalam Milyasari & Asmendri (2020), melibatkan pengumpulan informasi dan data dari berbagai sumber di perpustakaan, seperti dokumen, buku, majalah, dan kisah-kisah sejarah. Dengan memanfaatkan beragam sumber yang tersedia, peneliti dapat memperoleh wawasan yang komprehensif tentang topik yang diteliti, serta memperluas pemahaman mereka tentang berbagai tindakan antisipatif pemerintah dalam menghadapi krisis ekonomi.

HASIL & PEMBAHASAN

1. Kebijakan Moneter

a. Pengertian Kebijakan Moneter

Kebijakan moneter menjurus pada langkah-langkah yang diambil oleh Bank Sentral untuk mengendalikan variabel moneter seperti uang beredar, suku bunga, kredit, dan nilai tukar dengan tujuan mencapai sasaran ekonomi tertentu (Mishkin, 2008). Sebagai bagian dari kerangka kebijakan ekonomi makro, kebijakan moneter bertujuan mencapai pertumbuhan ekonomi yang seimbang, penciptaan lapangan kerja, stabilitas harga, dan keseimbangan neraca pembayaran. Fokusnya adalah pada mencapai stabilitas harga, pertumbuhan ekonomi yang seimbang, dan stabilitas sistem keuangan.

Dalam domain keuangan, kebijakan moneter memengaruhi dinamika suku bunga, nilai tukar, dan harga saham, serta mengatur volume dana yang disimpan oleh masyarakat di bank, serta kredit yang diberikan oleh bank kepada sektor bisnis. Kegiatan utama Bank dalam operasinya sebagai lembaga keuangan adalah menjalankan fungsi sebagai perantara (intermediary) antara pihak yang kelebihan dana dengan pihak yang kekurangan dana (Fransiska & Siregar, 2023).

Kebijakan moneter juga memiliki dampak pada investasi di instrumen keuangan seperti obligasi, saham, dan sekuritas lainnya. Di sektor riil, kebijakan moneter memengaruhi tingkat konsumsi, investasi, ekspor-impor, serta pertumbuhan ekonomi dan inflasi, yang merupakan tujuan akhir dari penerapan kebijakan moneter (Perry, 2004).

Selain itu, kebijakan moneter juga dimaksudkan untuk mengendalikan tingkat inflasi, merangsang pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, mengatur tingkat pengangguran, dan menjaga stabilitas nilai tukar mata uang. Untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut, otoritas moneter umumnya menggunakan berbagai instrumen seperti suku bunga, cadangan wajib bank, operasi pasar terbuka, dan intervensi valuta asing.

Tidak hanya itu, kebijakan moneter juga memiliki pengaruh terhadap tingkat investasi, konsumsi, dan produksi dalam perekonomian. Pengaturan yang tepat dalam kebijakan moneter dapat membantu menstabilkan siklus ekonomi, mengurangi fluktuasi ekonomi yang berlebihan, dan menciptakan fondasi yang kokoh untuk pertumbuhan jangka panjang. Dengan demikian,

kebijakan moneter memiliki dampak yang signifikan terhadap kondisi ekonomi makro dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

b. Instrumen Pengendali Moneter

Berikut ini adalah beberapa alat yang digunakan oleh bank sentral untuk mencapai tujuan kebijakan moneter, yang meliputi menjaga stabilitas harga, merangsang pertumbuhan ekonomi, dan menjaga stabilitas sistem keuangan.

1) Kebijakan Suku Bunga:

Bank sentral menggunakan suku bunga sebagai alat untuk mengatur pinjaman dan investasi. Penurunan suku bunga mendorong aktivitas pinjaman dan konsumsi, sedangkan kenaikan suku bunga dapat mengendalikan laju inflasi.

2) Operasi Pasar Terbuka

Bank sentral melakukan pembelian atau penjualan surat berharga pemerintah untuk mengatur jumlah uang yang beredar di pasar. Pembelian surat berharga meningkatkan likuiditas dengan meningkatkan uang beredar, sedangkan penjualan surat berharga dapat menguranginya.

3) Kebijakan Cadangan Wajib Bank

Bank sentral menetapkan persentase simpanan yang harus dipertahankan oleh bank sebagai cadangan. Perubahan dalam jumlah cadangan wajib dapat memengaruhi tingkat likuiditas bank dan ketersediaan pinjaman.

4) Kebijakan Kredit

Bank sentral dapat mengeluarkan kebijakan kredit untuk mengontrol jumlah pinjaman yang tersedia bagi masyarakat atau sektor tertentu.

5) Intervensi Valuta Asing

Bank sentral dapat membeli atau menjual mata uang asing untuk memengaruhi nilai tukar mata uang domestik dan mengatur aktivitas ekspor-impor.

6) Panduan Masa Depan (Forward Guidance)

Bank sentral memberikan komunikasi tentang rencana kebijakan di masa depan, termasuk arah suku bunga, untuk memengaruhi harapan pasar dan perilaku ekonomi. Instrumen Makroprudensial: Tindakan yang diambil untuk mengatur risiko sistemik dalam sistem keuangan, seperti menetapkan batasan kredit atau persyaratan modal.

2. Kebijakan Fiskal

Kebijakan fiskal merujuk pada pengumpulan pendapatan negara dari masyarakat dan penggunaannya oleh pemerintah untuk program-program yang bertujuan mencapai pencapaian dalam hal pendapatan nasional, produksi, dan perekonomian. Kebijakan fiskal juga berperan sebagai alat

untuk menjaga keseimbangan dalam perekonomian suatu negara. Sebagai faktor penentu arah ekonomi negara, pemerintah menggunakan kebijakan fiskal untuk mengatur ekonomi dengan mengendalikan tingkat pendapatan dan pengeluaran (Cahyasari, 2019).

Kebijakan fiskal adalah proses penyesuaian pendapatan dan pengeluaran pemerintah sesuai dengan rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang telah ditetapkan sebelumnya. Dalam pelaksanaannya, kebijakan fiskal merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah dan DPR, yang melibatkan perubahan dalam besaran pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak (Sudirman, 2014).

Kebijakan fiskal berpengaruh signifikan terhadap pendapatan nasional, distribusi penghasilan, kesempatan kerja, dan investasi di Indonesia (Silalahi & Ginting, 2020).

Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah dalam mendukung percepatan pembangunan ekonomi adalah melalui kebijakan stimulus fiskal. Stimulus fiskal berperan penting sebagai instrumen kebijakan counter-cyclical yang bertujuan untuk mengembalikan stabilitas ekonomi ketika mengalami resesi atau krisis (Lativa, Saniatul, 2021). Dengan memberlakukan stimulus fiskal, pemerintah berusaha merangsang pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan pengeluaran atau pemotongan pajak, sehingga meningkatkan kegiatan ekonomi dan mengurangi dampak negatif dari penurunan aktivitas ekonomi yang terjadi selama periode resesi atau krisis.

Selain itu, pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menciptakan undang-undang dan program yang mendukung kesejahteraan ekonomi semua penduduknya. Adapun cara-cara yang dilakukan pemerintah adalah sebagai berikut:

1. Pertumbuhan Ekonomi

Salah satu tujuan utama dari kebijakan fiskal adalah mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Ketika ekonomi berkembang dengan cepat, bisnis biasanya mengalami pertumbuhan yang signifikan dan pendapatan individu meningkat, yang pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan nasional secara keseluruhan. Salah satu metode yang dapat digunakan oleh pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi melalui kebijakan fiskal adalah dengan mengurangi tingkat pajak.

Dengan mengurangi pajak, konsumen memiliki lebih banyak uang yang dapat dihabiskan, yang kemudian akan mendorong investasi dan pendapatan bisnis, dan akhirnya mengarah pada pertumbuhan ekonomi. Selain itu, peningkatan pengeluaran pemerintah juga dapat merangsang pertumbuhan ekonomi.

2. Pekerjaan

Salah satu tujuan umum lain dari kebijakan fiskal adalah mencapai tingkat kesempatan kerja yang tinggi. Ketika tingkat pengangguran rendah, lebih banyak orang memiliki pendapatan yang memadai untuk melakukan pembelian dan konsumsi, yang pada akhirnya akan mendukung pertumbuhan ekonomi. Pengangguran seringkali memiliki keterbatasan dalam daya beli, yang dapat menghambat pertumbuhan ekonomi karena kurangnya permintaan akan barang dan jasa.

Oleh karena itu, mengurangi pajak untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dapat berdampak positif terhadap peningkatan lapangan kerja. Dengan adanya insentif pajak yang lebih rendah, perusahaan cenderung melakukan ekspansi bisnis, menciptakan lebih banyak peluang kerja bagi masyarakat.

Secara bersamaan, hal ini dapat mendorong penambahan tenaga kerja dan peningkatan tingkat lapangan kerja, yang pada akhirnya akan memberikan sumbangan pada kesejahteraan ekonomi secara menyeluruh.

3. Stabilitas Ekonomi

Salah satu tujuan penting dari kebijakan fiskal adalah menjaga stabilitas ekonomi dengan mengurangi dampak fluktuasi yang terjadi dalam perekonomian. Siklus ekonomi sering mengikuti pola global, di mana terjadi periode ekspansi dengan pertumbuhan ekonomi yang cepat, diikuti oleh periode perlambatan ekonomi atau bahkan resesi.

Pemerintah dapat menggunakan kebijakan fiskal sebagai alat untuk mengurangi risiko ini. Salah satu strateginya adalah dengan meningkatkan pengeluaran dan mengurangi pajak selama periode perlambatan ekonomi, dengan tujuan merangsang aktivitas ekonomi dan mendukung pertumbuhan.

Sebaliknya, ketika ekonomi mengalami ekspansi berlebihan yang dapat menyebabkan inflasi tinggi, pemerintah dapat mengambil langkah-langkah seperti peningkatan pajak dan pemangkasan pengeluaran untuk mencegah terjadinya overheating ekonomi.

Dengan demikian, pemerintah berusaha untuk meratakan siklus boom dan bust dalam upaya mencapai tren pertumbuhan ekonomi yang lebih stabil dan berkelanjutan. Hal ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan ekonomi yang lebih dapat diandalkan dan memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat secara keseluruhan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Dari hasil dan pembahasan yang disajikan, dapat disimpulkan bahwa kebijakan moneter dan fiskal merupakan instrumen utama yang digunakan pemerintah untuk mengatasi dan merespons krisis ekonomi. Kebijakan moneter, yang dijalankan oleh bank sentral, bertujuan untuk mempengaruhi variabel moneter seperti suku bunga, uang beredar, dan nilai tukar, dengan tujuan mencapai stabilitas harga, pertumbuhan ekonomi

yang seimbang, dan stabilitas sistem keuangan. Sementara itu, kebijakan fiskal, yang melibatkan pengaturan pendapatan dan pengeluaran pemerintah, bertujuan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi, menciptakan lapangan kerja, dan menjaga stabilitas ekonomi melalui pengaturan pajak, pengeluaran, dan stimulus fiskal.

Kedua kebijakan ini saling terkait dan berperan penting dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional. Kebijakan moneter dan fiskal dapat digunakan bersama-sama untuk merespons krisis ekonomi, seperti resesi atau inflasi tinggi, dengan menciptakan lingkungan ekonomi yang lebih stabil dan memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat secara keseluruhan.

DAFTAR REFERENSI

- Abdianti, D., Restu, A., Al Ayyubi, S., & Hidayat, F. (2023). Konsep Kebijakan Moneter dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Trending: Jurnal Manajemen Dan Ekonomi*, 1(3), 213–226.
- Fransiska, Y., & Siregar, P. A. (2023). The analysis of macroeconomic and microeconomic factors in non-performing financing of Sharia Bank in Indonesia. *Ekonomi, Keuangan, Investasi Dan Syariah (EKUITAS)*, 4(4), 1128–1136. <https://doi.org/10.47065/ekuitas.v4i4.3250>.
- Hamzah, A. (2020). *Metode Penelitian Kepustakaan (Library Research)*. Malang: Literasi Nusantara.
- Jhingan. (2010). *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan Cetakan ke 13*. Jakarta: Rajawali Press.
- Khan, M. S. (2011). The design and effects of monetary policy in Sub-Saharan African countries. *Journal of African Economies*, 20, 16–35.
- Lativa, Saniatul. (2021). Kebijakan Fiskal Indonesia Pada Masa Pandemi COVID-19 Dalam Meningkatkan Perekonomian. *Jurnal Ekonomi*, 23(3).
- Mishkin, Frederics, S. (2008). *Ekonomi Uang, Perbankan, dan Pasar Keuangan. Edisi Kedelapan. Terjemahan Lana Soelistianingsih dan Beta Yulianita. G*. Jakarta: Penerbit Salemba Empat
- Perry, W. (2004). *Mekanisme Transmisi Kebijakan Moneter di Indonesia. Buku Seri Kebanksentralan No.11*. Pusat Pendidikan Dan Studi Kebanksentralan (PPSK) Bank Indonesia
- Sari, M., & Asmendri. (2020). Penelitian Kepustakaan (Library Research) Dalam Penelitian Pendidikan IPA. *Jurnal Penelitian Bidang IPA Dan Pendidikan IPA*, 41-53.
- Silalahi & Ginting. (2020). Strategi Kebijakan Fiskal Pemerintah Indonesia dalam Menghadapi Dampak Pandemi COVID-19. *Jesya: Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah*, 3(2).
- Siregar, E. Y. (2021). Kerangka Kerja Kebijakan Moneter Dalam Islam. *Jurnal Allqtishad*, 17(2), 163–175.
- Siregar, P. A., Suryani, S., & Silalahi, J. (2022). Tinjauan Hukum islam terhadap praktik Bagi Hasil Pada Hewan Ternak kambing. *JURNAL HUKUM EKONOMI SYARIAH*, 5(2), 117. <https://doi.org/10.30595/jhes.v5i2.12373>.
- Sudirman, I. W. (2014). *Kebijakan Fiskal dan Moneter: Teori dan Empirikal*. Jakarta: Kencana.

- Suindyah, S. (2011). Pengaruh Investasi, Tenaga Kerja Dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Provinsi Jawa Timur. *Jurnal Ekonomi Dan Keuangan*, 15(4).
- Sukirno, S. (2016). *Makro Ekonomi: Teori Pengantar*. Jakarta: Rajawali Press.